BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan Manajemen Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Perencanaan merupakan dasar fundamental manajeman yang terlebih dahulu dibuat dan direncanakan untuk masa akan datang, agar resiko yang ditanggung relatif kecil. Perencanaan kinerja aparatur bertujuan untuk mengelola kinerja aparatur agar menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal ini M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Perencanaan manajemen kinerja aparatur ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala-kendala dalam peningkatan kinerja serta penggunaan M-CAP yang akan mempengaruhi kinerja para aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam manajemen kinerja aparatur khususnya dalam pelayanan M-CAP. M-CAP ini dibuat dan dipergunakan di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010.

Perencanaan Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat merupakan perencanaan jangka panjang proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program.

Program adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam perumusan strategi. Adapun program yang telah di buat oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam jangka panjang yaitu program peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP.

Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat memiliki perencanaan strategis, dimana perencanaan strategis merupakan cakupan penyusunan rencana jangka panjang. Adapun rencana strategis dari Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam jangka panjang ialah terwujudnya kinerja aparatur yang baik dalam pelayanan sistem informasi khususnya dalam pelayanan M-CAP.

Berdasarkan program perencanaan yang dibuat oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat bahwa perencanaan yang dilakukan:

> "Perencanaan yang akan dilakukan dalam Pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat merupakan perencanaan jangka panjang proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program yaitu perencanaan yang strategis yang dimaksud perencanaan jangka panjang supaya terwujudnya kinerja aparatur yang baik dalam pelayanan sistem informasi khususnya dalam pelayanan M-CAP"(Eko, 03/06/2012)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa perencanaan merupakan hasil kerja yang akan dilakukan untuk mencapai sarana dan prasarana sebagai faktor untuk menunjang kinerja aparatur dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan sistem informasi khususnya M-CAP,

dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana ini dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang berbasis komputerisasi.

Kegiatan perencanaan lain yang sedang dijalankan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat:

> "Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kinerja aparatur di bidang sistem informasi khususnya dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. "(Eko, 03/06/2012)

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur bahwa kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kinerja aparatur dalam memahami konsep *e-Government*. Sejauh ini kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam pelayanan sistem informasi khususnya pelayanan M-CAP belum memenuhi standar yang diharapkan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan faktor penghambat kinerja aparatur Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan M-CAP.

Kegiatan lain yang dibuat oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat adalah mengalokasikan dana untuk pengembangan aparatur dalam pelayananM-CAP. Hal ini merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP. Dengan adanya alokasi dana yang dikeluarkan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam pelayananM-CAP dapat meningkatkan kinerja aparatur, mudah dalam menjalankan setiap tugas-tugas aparatur, Dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dibutuhkan alokasi dana yang cukup besar untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Dengan adanya alokasi dana ini, diperuntukan pengadaan sarana dan prasarana yang dapat

menunjang aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Dengan terpenuhinya sarana dan prasaran dalam pelayanan M-CAP dapat mewujudkan aparatur yang berbasis komputerisasi.

Dengan adanya kegiatan alokasi dana ini sangat mendukung keberhasilan dari M-CAP. Biaya sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program memerlukan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu kesiapan modal sangat diperlukanseperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya. Modal sangat diperlukan untuk mensukseskan pelayanan M-CAP, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan dana.

Selama ini pelayanan M-CAP sudah berjalan cukup baik walaupun pada kenyataanya masih mengalami kendala sehingga pelaksanaannya belum maksimal, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dana. Modal yang tersedia belum mencukupi untuk membiayai pelaksanaan M-CAP dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga menjadikan pelaksanan yang telah dijalankan mengalami berbagai kendala.

Berdasarkan dari hasil perencanaan kegiatan yang dilakukan saat ini, dapat disimpulkan bahwa pelayanan M-CAP dalam jangka waktu yang panjang yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barattelah berjalan, walaupun pada kenyataannya masih belum memenuhi harapan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka guna mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP.Untuk menciptakan efektivitas kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP diperlukan

pengadaan sarana dan prasarana, kemapuan dan pengetahuan aparatur dan pengalokasian dana yang dilakukan secara berkesinambungan.

Perencanaan kinerja aparatur dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat (*performance Plan)* 2010 yang disusun ini merupakan suatu dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari rencana stratejik model baru dimana sebagian isinya sudah tercantum dalam rencana stratejik model sebelumnya. Perencanaan Kinerja dinaskominfo merupakan uraian lebih mendetail dari rencana stratejik yang telah disusun sebelunya. Rencana stratejik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahun yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus.

Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja dinas komunikasi dan informatika dapat terangkat dan lebih terfokus. Perencanaan kinerja ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya. Sebagaimana telah dikemukanan sebelumnya bahwa rencana kinerja yang disusun ini merupakan yang pertama sesuai dengan rencana stratejik model baru sehingga masih banyak terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut diharapkan dapat diperbaiki pada pembuatan rencana kinerja pada periode-periode berikutnya.

4.1.1 Kebijakan Manajemen Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Perencanaan manajemen kinerja aparatur adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan manajemen kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Kebijakan manajemen kinerja aparatur ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang manajemen kepegawaian, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan kualitas aparatur dalam bidang sistem informasi yang ada akan meningkat, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh bagi aparatur lainnya yang ada dilingkungannya.

Kebijakan berguna untuk menjamin keserasian daripada tindakan, karena kebijakan merupakan pola daripada kegiatan organisasi, faktor yang mendukung dalam kebijakan M-CAP dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat adalah pedoman yang digunakan dalam penggunaan sistem informasi penanaman modal dan pengambilan keputusan. Apabila kebijakan tersebut telah ada, maka pedoman merupakan petunjuk yang dijadikan arahan atau sesuatu yang digunakan sebagai petunjuk atau sebagai pedoman.

Kebijakan manajemen kinerja aparatur dalam meningkatkan kinerja aparatur adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada aparatur dalam meningkatkan kualitas kerja

dalam pelayanan M-CAP, sehingga dapat tercapainya tujuan bersama yang diharapkan dinas komunikasi dan informatika. Setiap kebijakan manajemen kinerja aparaturyang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan arah atau tujuan program manajemen kinerja aparatur yang diharapkan oleh dinas komunikasi dan informatika.

Program pedoman penyusunan kebijakan tentang M-CAP sangat memerlukan dukungan *Management* guna kepentingan intern Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat maupun ekstern yang dapat menjamin kerja sama dengan Dinas lain. Adapun Program penyusunan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, meliputi:

1. Sistem koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan kelembagaan lainnya;
2. Pembangunan dan pengembangan M-CAP;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan bidang sistem informasi;
4. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Kinerja aparatur. (Eko, 03/06/2012)

Berdasarkan hasil wawancara penyusunan kebijakan diatas yang dibuat oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaannya masih belum tercapai, dikarenakan fungsi belum berjalan baik, Belum optimalnya pemutakhiran data, terbatasnya anggaran baik untuk operasional maupun peningkatan kemampuan kinerja aparatur, belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah dan belum optimalnya program sosialisasi.

Namun dalam kenyataannya perencanaan dalam kebijakan manajemen kinerja aparatur belum berjalan dengan baik. Hal ini masih banyaknya kendala-

kendala yang timbul di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, seperti kurangnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan kualitas kerja aparatur terutama dalam pelayanan M-CAP, dapat diatasi dengan kebijakan manajemen kinerja aparatur yang dikeluarakan oleh dinas komunikasi dan informatika, tujuan kebijakan adalah adanya motivasi dan bimbingan terhadap peningkatan kerja aparatur yang diharapkan terwujud.

Program kebijakan manajemen kinerja aparatur dilaksanakan, untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur dalam pelayanan M-CAP, sehingga tidak terjadi penurun kualitas kerja aparatur dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar tujuan dari organisasi dapat tercapai serta berjalan secara efektif dan efisien. Kinerja aparatur merupakan unsur terpenting dalam sebuah instansi pemerintahan, dengan diterapkannya kebijakan manajemen kinerja aparatur diharapkan setiap aparatu harus sadar akan pentingnya sebuah manajemen, yang selalu memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kerja dan tercapainya tujuan bersama.

Kebijakan manajemen kinerja aparaturmerupakan sebuah konsep ataupun gagasan yang memerlukan usaha-usaha untuk dapat merealisasikan dan melaksankan program kerja yang telah direncanakan. Hal tersebut, memerlukan banyak kesadaran dari aparatur itu sendiri yang pada akhirnya kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai proses aktivitas yang mengarah pada penempatan program manajemen kinerja aparatur itu sendiri. Kebijakan manajemen kinerja aparatur ditetapkan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan peran besar bagi pelaksanaan pemerintahan yang

baik dan mewujudkan keberhasilan kebijakan manajemen kinerja aparatur di dinas pedapatan dan pengelolaan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari belum adanya kesadaran dari setiap aparatur untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan M-CAP serta belum berjalannya fungsi koordinasi, pemutakhiran data, terbatasnya anggaran, kemampuan kinerja aparatur, pemanfaatan teknologi, dan program sosialisasi inilah faktor yang sangat mendukung terlaksananya pelayanan M-CAP. Akan tetapi dari kesemua faktor tersebut belum berjalan dengan baik, masih ada kendala-kendala sehingga pelayanan yang diberlakukan belum tercapai.

4.1.2 Anggaran Manajemen Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Anggaran dalam manajemen kinerja aparatur adalah suatu rencana yang menggambarkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kinerja aparatur terutama kinerja aparatur pada pelayanan M-CAP. Dalam anggaran harus tercantum besarnya pemakaian dan hasil yang diperoleh dari manajemen kinerja aparatur. Anggaran merupakan faktor pendukung dalam proses manajemen dari hasil yang diharapkan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil manajemen dinyatakan dengan kesatuan uang.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan suatu organisasi. Anggaran merupakan faktor penunjang kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.Anggaran ini bertujuan untuk pengadaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.Agar menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal ini M-CAP.

Pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dibutuhkan anggaran dana yang cukup besar untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Dengan adanya anggaran dana ini, diperuntukan pengembangan aparatur serta pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Dengan terpenuhinya sarana dan prasaran dalam pelayanan M-CAP dapat mewujudkan aparatur yang berbasis komputerisasi serta bertujuan meningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya.

Pengadaaan sarana dan prasarana adalah untuk menunjang proses dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat agar berjalan dengan efektif, dengan demikian sarana pendukung merupakan faktor utama untuk menentukan apakah sarana yang dimiliki tersebut memadai atau tidak dan bagaimana kemudahan yang diberikan dalam mengaksesnya. Pendukung sarana yang dibutuhkan oleh M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat yaitu jaringan komputer maupun beserta *software*nya.

Pendukung sarana berupa jaringan komputer maupun beserta *softwarenya* sangat diperlukan untuk terlaksananya pelayanan M-CAP, karena tanpa sarana tersebut maka proses pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, diharuskan menyediakan sarana tersebut, agar didalam pelayanannya tidak menemui hambatan, yaitu:

Pertama, jaringan komputer merupakan hal yang penting dalam teknologi informasi dengan memiliki sarana yang memadai maka informasi dapat lebih cepat dan efektif untuk penyebarannya, sehingga dengan adanya sarana pendukung maka akan semakin mudah untuk mengaksesnya, dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat diharapkan dalam mengakses data menjadi mudah. Dengan adanya jaringan tersebut maka lebih memudahkan dalam melakukan pertukaran data, dengan cara yaitu membuat jaringan komputer yang dihubungkan dengan seluruh bagian atau bidang yang ada di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Jumlah sarana pendukung yang khusus digunakan untuk pelayanan sistem informasi penanaman modal berjumlah 6 unit komputer dengan jaringan *LAN DAN WIFI*, jaringan tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam mengakses.Untuk jaringan *WIFI* dapat digunakan di sekitar lingkungan lapangan, sedangkan jaringan *LAN*untuk menghubungkan satu unit computer ke komputer lainnya. Adanya fasilitas jaringan tersebut maka sarana yang mendukung dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup baik.Dikarenakan terlihat dengan tersedianya fasilitas jaringan *WIFI* dan jaringan

LAN, oleh karena itu adanya sarana tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat.

Kedua, komputer beserta *software*nya merupakan kebutuhan di dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam pelayanan sistem tersebut terdapat sarana yang mendukung diantaranya dengan memiliki beberapa unit komputer yang ada di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi jumlah sarana sewaktu-waktu dapat berubah, dikarenakan anggaran pengadaan pembaharuan komputer setiap tahun ada perubahan untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana.

Dari kedua sarana pendukung yang ada di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dipergunakan dengan baik, karena pengguna komputer yaitu aparatur hanya sebagian orang saja yang bisa menggunakannya disebabkan kurangnya kinerja aparatur di dalam menggunakannya. Pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, dikarenakan aparatur sebagai pengguna sistem tersebut sedikit yang bisa menguasainya.

Permasalahan yang terdapat di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat mengenai sarana dan prasarana ialah kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan terhadap sarana yang ada, sehingga apabila ada kerusakan dengan komputer maka harus melibatkan orang luar untuk memperbaiki. Dengan begitu biaya perbaikan sarana dan prasarana juga dibutuhkan sangat besar, yang menjadi

hambatan adalah kurangnya pemahaman aparatur di dalam menggunakan komputer dan sarana yang tersedia tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin maka akan terbengkalai seperti banyaknya kerusakan-kerusakan pada komputer akan berdampak dalam proses pelayanan sistem informasi penanaman modal menjadi tidak berjalan efektif. Sehingga yang terjadi akan menyebabkan banyaknya pengeluaran dana untuk memperbaikinya, oleh karena itu dibutuhkan perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan yang baik oleh aparatur dalam menggunakan sarana dan prasarana agar pelaksanaan M-CAP dapat tercapai dengan baik.

Minimnya dana yang dikeluarkan dalam pengadaan sarana dan prasarana juga yang menjadikan hambatan di dalam kelancaran pelayanan M-CAP, karena untuk anggaran perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan dibutuhkan dana yang besar. Sebab faktor tersebut sifatnya berkala, artinya disaat komputer mengalami kerusakan, sehingga apabila tidak dapat diperbaiki kembali maka sarana tersebut harus digantikan dengan yang baru.

Kegiatan alokasi dana ini sangat mendukung keberhasilan dari M-CAP. Biaya sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua jenis program pelayanan yang berbasis teknologi memerlukan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu kesiapan modal sangat diperlukan seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi

lainnya. Modal sangat diperlukan untuk mensukseskan pelayanan M-CAP, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan dana.

Untuk pencapaian tujuan M-CAP dalam kurun waktu yang panjang, perlu adanya dukungan anggaran yang besar untuk menggali dan mengembangkan kinerja aparatur, agar aparatur dalam menerapkan M-CAP bisa mengaplikasikan sistem tersebut dengan benar. Sehingga anggaran yang besar dapat memperbaiki M-CAP menjadi lebih baik dan dapat berjalan dengan baik dan efektif, untuk digunakan oleh aparatur.

Penyususnan anggaran ini dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam mengalokasikan sumber-sumber yang ada serta berapa besar penetapan anggarannya untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Biaya sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program memerlukan anggaran yang tidak sedikit, oleh karena itu kesiapan modal sangat diperlukan seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya. Modal sangat diperlukan untuk mensukseskan pelayanan M-CAP, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan dana.

Selama ini pelayanan M-CAP masih mengalami kendala sehingga pelaksanaannya belum maksimal, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dana. Modal yang tersedia belum mencukupi untuk membiayai pelaksanaan M-CAP dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga menjadikan pelaksanan yang telah dijalankan mengalami berbagai kendala.

4.2 Pembinaan Manajemen kinerja aparatur Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat

Pembinaan kinerja aparatur adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, artinya seorang kepala Dinas harus mampu melakukan kegiatan manajemen kinerja aparatur untuk mencapai tujuan yang diingingkan, pembinaan yang dilakukan oleh kepala Dinas harus adanya penetapan dan pemberdayaan aparatur pekerjaan serta pendelegasian wewenang yang didelegasikan kepada bawahannya atau staf bidang-bidang unit kerja, hal ini dalam rangka pelaksanaan mewujudkan keberhasilan kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Pembinaan adalah proses bagaimana pembagian tugas dan wewenang kepada setiap aparatur untuk dilaksanakan. Dengan demikian adanya kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa tanggung jawab itu disampaikan.Pembinaan dibentuk untuk mengatur kerja setiap aparatur menjalankan segala tugas sesuai dengan tanggung jawab.

Pembinaan program manajemen kinerja aparatur yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat yaitu kepala dinasdibantu oleh bidang-bidang unit kerja, dan para staf untuk pembinaan program yang telah dibuat, pembinaan yang dibuat tidak hanya para staf dinas, akan tetapiseluruh perangkat kerja aparatur yang ada di dinas komunikasi dan informatika.

Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat membuat pembinaan, dimana pembinaan tersebut merupakan cakupan tentang penyusunan susunan dan uraian tugas yang jelas. Adapun penggorganisasian diDinas

komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Baratdibuat agar tujuan dari kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP tercapai.

Pembinaan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan suatu organisasi. Pembinaan merupakan faktor penunjang kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Pembinaan ini bertujuan untuk mengatur tugas aparatur dengan jelas dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.Agar menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal ini M-CAP.

Dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan struktur organisasi yang terdapat pada gambar 3.2 dibutuhkan pembinaan yang cukup sistematis untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Dengan adanya pembinaan ini, diperuntukan pengembangan aparatur dalam menjalankan tugas terutama dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya pembinaan yang baik dalam pelayanan M-CAP dapat mewujudkan aparatur yang berkerja secara terorganisir terutama dalam penggunaan M-CAP serta bertujuan meningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya.

Pembinaan ini dikhususkan untuk kinerja aparatur yang terkait pada bidang telematika, yaiut:

> Pembinaan yang dilakukan pada bagian staf bidang telematika khususnya pada pengelolaan M-CAP haruslah benar-benar tercapai, karena sistem informasi merupakan pekerjaan yang nyata dan tidak bisa di sangkut pautkan dengan pekerjaan lainnya, maka dari itu dengan diadakannya pembinaan khusus kepada setiap aparatur diwajibkan mengikuti setiap pelatihan-pelatihan khusus dalam mengoprasikan teknologi, karena tidak

> setiap aparatur dalam pengelolaan M-CAP ini yang sesuai dengan latar pendidikannya.(Eko, 03/06/2012)

Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya pembinaan ini sangat mendukung keberhasilan dari M-CAP. Pembinaan sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program kerja memerlukan uraian tugas yang jelas, oleh karena itu pembinaan sangat diperlukan seperti untuk mengatur tugas-tugas setiap aparatur.pembinaan sangat diperlukan untuk mensukseskan pelayanan M-CAP, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan tugas-tugas aparatur yang harus disusun secara sistematis dan terperinci.

Untuk pencapaian tujuan M-CAP dalam pembinaan, perlu adanya perincian tugas yang sistematis untuk menjalankan dan mengembangkan kinerja aparatur, agar aparatur dalam menerapkan M-CAP bisa menjalankan dan mengaplikasikan sistem tersebut dengan benar. Sehingga pembinaan yang baik dapat memperbaiki M-CAP menjadi lebih baik dan dapat berjalan dengan baik dan efektif, untuk digunakan oleh aparatur.

Penyususnan pembinaan ini dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam menjalankan setiap tugas yang ada serta adanya penetapan aparatur yang cocok untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. pembinaan sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program memerlukan rincian tugas yang tidak mudah, oleh karena itu kesiapan pembinaan sangat diperlukan seperti untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab setiap aparatur. Pembinaan sangat diperlukan untuk mensukseskan pelayanan M-CAP, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali tugas yang harus dibuat secara terperinci

agar tidak terjadi adanya salah dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan tugas tidak terselesaikan.

Selama ini pelayanan M-CAP berjalan cukup baik, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan yang dijalankan dengan baik. Pembinaan yang ada mencukupi untuk memberikan kejelasan tentang rincian tugas dalam pelaksanaan M-CAP dengan, sehingga menjadikan pelaksanan yang telah dijalankan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya penggorganisasian yang dibuat oleh dinas komunikasi dan informatika berjalan secara baik hal ini bisa dilihat dari adanya struktur organisasi sesuai dengan gambar 3.2, aparatur yang bekerja sesuai dengan pembinaan. Hal ini menyebabkan pembinaan yang dibuat oleh dinas komunikasi dan informatika berjalan dengan baik.

4.2.1 Pendorongan Aparatur Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Kegiatan kinerja aparatur adalah bagian dari pembinaan manajemen dan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, setiap aparatur harus mampu menjalankan kegiatan manajemen kinerja aparatur untuk mencapai tujuan yang diingingkan organisasi, kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan setiap aparatur dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab, hal ini dalam rangka pelaksanaan mewujudkan keberhasilan kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam manajemen kinerja aparatur khususnya dalam pelayanan

M-CAP adalah mendorong aparatur dalam kemampuan kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP, setiap aparatur terkait dapat mengoperasikan sistem informasi khususnya sistem informasi tersebut.

Ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam mendorong aparatur dalam pelayanan M-CAP:

Pertama dengan penyediaan kinerja aparatur sebagai sarana dalam penggunaan M-CAP. Dikarenakan penggunaan M-CAP dalam memberikan informasi terhadap masyarakat, dibutuhkan unsur kinerja aparatur yang baik, sebab sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan aplikasi pelayanan M-CAP. Kinerja Aparatur merupakan faktor dan modal utama yang dapat menunjang aparatur dalam upaya mengaplikasikan M-CAP, karena apabila kualitas kinerja aparatur tinggi maka akan mudah mengerjakannya. Dengan begitu aparatur dapat menguasai M-CAP menjadi lebih professional, maka ketersediaan operator yang mahir dan terlatih adalah suatu hal yang penting keberadaannya di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Mendorong aparatur dapat dilakukan melalui serangkaian *training* yang mampu mendorong meningkatnya kinerja aparatur yang ada di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, dalam menangani M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.Peningkatan pemahaman aparatur dalam bentuk program pendidikan terpadu yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai berbagai langkah stategis dalam pengaplikasian M-CAP. Oleh karena itu pelaksanaan pelayanan M-CAP bisaberjalan efektif apabila

ditunjang dengan kemampuan kinerja aparatur yang memadai, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa kegiatan dalam meningkatkan kinerja aparaturDinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat masih diperlukan adanya kegiatan pembinaan aparatur yang berkelanjutan.

*Kedua***,** infrastruktur yaitu dengan menyediakan sarana penunjang dalam pelayanan M-CAP yang terdiri dari komputer, CPU (*server*), jaringan komputer (LAN),dan dilengkapi dengan alat pendukung lainnya. Dengan demikian apabila infrastruktur tersebut telah terpenuhi maka aparatur dalam mengaplikasikan M-CAP dapat memberikan pelayanan informasi menjadi lebih baik.

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan suatu organisasi. Infrastruktur merupakan faktor penunjang kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam mengoperasikan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Agar menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal ini M-CAP.

Pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dibutuhkan infrastruktur yang baik untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Dengan adanya infrastruktur ini, diperuntukan pengembangan aparatur dan menunjang kinerja aparatur dalam mengoperasikan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dalam pelayanan M-CAP dapat mewujudkan aparatur yang berbasis

komputerisasi serta bertujuan meningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya.

Adanya kegiatan ini sangat mendukung keberhasilan dari M-CAP. Kegiatan ini sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program memerlukan kegiatan yang baik, oleh karena itu kesiapan kegiatan sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan M-CAP. Kegiatan modal sangat diperlukan untuk mensukseskan pelayanan M-CAP, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP.

Selama ini pelayanan M-CAP masih mengalami kendala sehingga pelaksanaannya belum maksimal, hal tersebut dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat yang belum bisa dijalankan dengan baik. Kegiatan yang ada belum dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan M-CAP dengan, sehingga menjadikan kegiatan yang telah dilakukan mengalami berbagai kendala. Dalam pelaksanaannya kegiatan yang dibuat oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara baik. Hal ini dikarenakn tidak adanya kegiatan yang berkelanjutan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

4.2.2 Pemberdayaan Aparatur Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Pemberdayaan aparatur adalah proses bagaimana memberdayakan dan wewenang kepada setiap aparatur untuk dilaksanakan dalam menjalankan setiap kegiatan sesuai berdasarkan struktur organisasi yang terdapat pada gambar 3.2. Demikian adanya kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa tanggung jawab itu disampaikan.Pengelompokkan kegiatan dibentuk untuk mengatur kerja setiap aparatur menjalankan segala kegiatan sesuai dengan tanggung jawab demi terwujudnya kegiatan yang berhasil.

Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat membuat Pemberdayaan aparatur kegiatan, dimana pengelompokkan tersebut merupakan cakupan tentang penyusunan susunan dan uraian tugas yang jelas. Adapun Pemberdayaan aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Baratdibuat agar tujuan dari kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP tercapai.

Berdasarkan struktur organisasi yang terdapat pada gambar 3.2 Pemberdayaan aparatur merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan suatu organisasi. Pemberdayaan merupakan faktor penunjang kinerja aparatur dalampelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Pemberdayaan aparaturini bertujuan untuk mengatur tugas aparatur dengan jelas serta adanya kerja sama antar aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat agar menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam penggunaan sistem informasi dalam hal ini M-CAP.

Terwujudnya keberhasilan manajemen kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP harus didasarkan pada pemberdayaan aparatur kegiatan di setiap bagian-bagian unit kerja. Hal ini sangat dibutuhkan kemampuan dan keahlian seorang kepala dinas untuk mengkoordinasikan program kerja manajemen kinerja aparatur yang dilaksanakan Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Mewujudkan kegiatan pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dibutuhkan pemberdayaan aparatur yang cukup sistematis untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Adanya pemberdayaan aparatur ini, diperuntukan setiap kegiatan yang dibuat dapat terwujuddan berjalan baik. Dengan adanya pemberdayaan aparatur kegiatan yang baik dalam pelayanan M-CAP dapat mewujudkan aparatur yang berkerja secara terorganisir terutama dalam penggunaan M-CAP serta bertujuan berjalannya kegiatan secara sistematis dan terarah.

Adanya pemberdayaan aparatur ini sangat mendukung keberhasilan dari pelaynan M-CAP. Pemberdayaan aparatur sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua kegiatan memerlukan uraian tugas yang jelas sesuai dengan bagian-bagian kegiatan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan, oleh karena itu Pemberdayaan aparatur angat diperlukanseperti untuk mengatur tugas-tugas setiap aparatur.

Penyususnan pemberdayaan aparatur ini dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam menjalankan setiap tugas yang ada serta adanya penetapan aparatur yang cocok untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Pemberdayaan aparatur sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua

kegiatan memerlukan rincian tugas yang tidak mudah, oleh karena itu kesiapan pemberdayaan aparatur sangat diperlukan seperti untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab setiap aparatur. Pemberdayaan aparatur sangat diperlukan untuk mensukseskan pelayanan M-CAP, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali tugas yang harus dibuat secara terperinci agar tidak terjadi adanya salah dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan tugas tidak terselesaikan.

Selama ini pelayanan M-CAP masih mengalami kendala sehingga pelaksanaannya belum maksimal, hal tersebut dikarenakan pemberdayaan aparatur yang dibuat belum bisa dijalankan dengan baik, yaitu:

> Pemberdayaan aparatur yang ada belum mencukupi untuk memberikan kejelasan tentang rincian tugas dalam pelaksanaan M-CAP dengan, sehingga menjadikan pelaksanan yang telah dijalankan mengalami berbagai kendala. (Eko, 23/06/2012)

Dalam pelaksanaannya penggorganisasian yang dibuat oleh dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara baik hal ini masih banyaknya aparatur yang ada belum bekerja sesuai bidang kegiatan yang telah dibuat. Hal ini menyebabkan pembinaan yang dibuat oleh dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat tidak berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas dalam memberdayakan aparatur pemerintah khususnya para aparturnya. Oleh sebab itu diperlukan prestasi kerja dari para pegawai agar tujuan-tujuan dari instansi dapat tercapai dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk mencapai prestasi kerja pegawai yang maksimal, diperlukan langkah-langkah konkrit yang

dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Seperti melakukan pengadaan pegawai yang selektif, melaksanakan pembinaan karir yang baik, memberikan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan pemberian gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai yang sesuai dengan beban kerja. Sehingga tujuan –tujuan dari instansi akan dengan mudah tercapai.

Pemberdayaan aparatur pemerintah adalah proses yang diberikan kepada pegawai agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengembangkan diri dengan memiliki ketrampilan, sikap, wawasan, dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dibebankan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberdayaan aparatur dinas komunikasi dan informatika terhadap prestasi kerja setiap aparaturnya, serta menguji hipotesa bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemberdayaan aparatur terhadap prestasi kerja.

4.2.3 Iklim Kerja Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Iklim kerja merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap kepuasan kerja seseorang. Pengaruh iklim kerja akan sangat dirasakan oleh para pegawai dan sangat menentukan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil dari hipotesis menunjukkan bahwa faktor iklim kerja tersebut mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. Iklim kerja adalah suasana di tempat kerja, yang membedakannya dari tempat kerja yang lain. Iklim kejra akan menjawab

pertanyaan apakah Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat tersebut merupakan tempat kerja yang menyenangkan bagi setiap kinerjanya. Dinas komunikasi dan informatika merupakan gabungan antara persepsi, keinginan, kebijaksanaan, kebijakan, sistem dan prosedur yang apabila dinyatakan dalam satu kalimat adalah: Bagaimana cara aparatur mengerjakan sesuatu di Dinas komunikasi dan informatika. Iklim kera ini penting karena akan mempengaruhi kinerja individu dan organisasi yaitu membangkitkan (atau mengendorkan) motivasi dan komitmen seseorang di Dinas komunikasi dan informatika terutama pada bagian pelayanan M-CAP tersebut.

Banyak hal yang mendorong aparatur dinas komunikasi dan informatika giat dan bersemangat dalam bekerja, baik dorongan yang berasal dari internal dirinya sendiri maupun dorongan yang bersifat eksternal. Dorongan dari internal diri biasanya lebih bersifat spiritual karena pengaruh keyakinan atupun karena seseorang merasa senang kepada pekerjaan tersebut, sehingga aparatur dinas komunikasi dan informatika melakukannya dengan senang hati dan semangat tinggi. Adapun faktor pendorong motivasi kerja yang berasal dari eksternal diri seseorang, salah satunya adalah karena adanya persaingan. Aparatur yang melakukan sesuatu karena ada kompetitor, tentu akan lebih bersemangat daripada mereka yang tidak memiliki kompetitor. Karena itu, untuk meningkatkan kinerja para aparatur ataupun karyawan diperlukan adanya sebuah iklim kerja yang kompetitif dan kondusif.

Upaya peningkatan kinerja aparatur dinas komunikasi dan info juga telah diterapkan dengan baik di Provinsi Jawa Barat.

> Kepala dinas telah membuat beberapa program yang dapat memberikan semangat kepada aparaturnya untuk lebih giat berprestasi. Di antaranya adalah (1) mengadakan pelatihan khusus terhadap teknologi masa kini, sehingga aparatur dapat mengoprasikan jenis layanan berbasis teknologi masa kini. (2) Memberikan pembinaan terhadap aparatur terkait dengan pelayanan M-CAP, setiap aparatur dibimbing dan diberi pengarahan. (3) Pemberian reward bagi aparatur yang memiliki prestasi bagus dalam kinerja mereka. (Bbng, 23/06/2012)

Dengan adanya iklim kerja yang kondusif di dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dapat menimbulkan kenyamanan lingkungan bagi setiap aparaturnya dampak pada peningkatan atau penurunan motivasi kerja serta kepuasan kerja aparatur. Bagaimana tidak, seorang aparatur mengalokasikan waktunya sebagian besar di lingkungan pekerjaan dan kemudian sebagian lagi untuk kegiatan domestic serta kegiatan lain-lain. Jika dalam proses tersebut terjadi gap atau ketidak sesuaian maka kestabilan emosi dan mental yang ada pada diri individu tersebut turut terpengaruh. Fokus dan konsentrasi kerja seorang individu dalam melaksanakan pekerjaan menjadi hal yang penting ketika individu tersebut merasa nyaman dan perhatian tidak terpecah belah, ide dan etos pekerjaan akan mengalir dengan baik untuk menghasilkan output yang maksimal. Kecenderungan seorang individu. Adalah menjadi tugas manajemen agar setiap aparatur dinas komunikasi dan informatika memiliki semangat kerja dan moril yang tinggi serta ulet dalam bekerja, terutama pada bagian bidang telematika pelayanan M-CAP. Biasanya aparatur yang puas dengan apa yang diperolehnya dari dinas akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan dan ia akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya. Sebaliknya staf yang kepuasan kerjanya rendah,

cenderung melihat pekerjaan sebagai hal yang menjemukan dan membosankan, sehingga ia bekerja dengan terpaksa dan asal-asalan. Untuk itu merupakan keharusan bagi organisasi untuk mengenali faktor-faktor apa saja yang membuat staf puas bekerja di organisasi atau institusi tersebut.

Dengan kemampuan intelegensia dan etos kerja yang baik ditunjang dengan iklim kerja yang mendukung diharapkan upaya terhadap SDM di dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dapat tercapai sebagaimana tujuan yang diharapkan. Kemampuan SDM dengan karakteristik individu yang mendukung seperti latar belakang akademik, pengalaman, motivasi, kepuasan kerja mengarahkan kepada produktivitas dan kinerja individu tersebut dengan sendirinya akan lebih loyal dan focus akan kemajuan pekerjaannya. Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat tentunya juga tidak terlepas dari faktor SDM ini, sehingga menjadi salah satu fokus dalam reformasi birokrasi, agar hasil yang diperoleh dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penting bagi sebuah dinas untuk memperhatikan kualitas SDM dan iklim kerja setiap aparatur yang sehat untuk menunjang proses kinerja, sehingga pada banyak organisasi melakukan evaluasi kinerja individu, evaluasi kinerja organisasi atau penelitian mengenai budaya organisasi, iklim organisasi, produktivitas kerja, motivasi kerja pegawai dengan harapan rekomendasi yang diperoleh dapat memberikan usulan-usulan yang strategis untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Gambaran dan deskripsi detail tentang kondisi SDM dan iklim kerja yang diperoleh memberikan banyak masukan berarti untuk perbaikan dinas komuniksi

dan informatika Provinsi Jawa Barat kedepan untuk memperkuat kualitas dan outputnya.

Pengendalian iklim kerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas SDM di lingkungan dinas komunikasi dan informatika. Iklim kerja didefinisikan sebagai suasana psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku setiap aparaturnya, terbentuk sebagai hasil tindakan organisasi dan interaksi diantara aparatur dinas. Karena perilaku merupakan fungsi dari karakteristik manusia dan persepsinya terhadap lingkungan, maka persepsi anggota organisasi terhadap iklim kerja yang terbentuk dilingkungan kerjanya akan mempengaruhi perilakunya dalam bekerja, dimana hal ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil kerjanya. Persepsi yang positip terhadap iklim kerja akan memberikan hasil kerja yang positip, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, dengan merubah persepsi anggota organisasi terhadap iklim kerja, dapat dihasilkan peningkatan produktivitas.

4.3 Evaluasi Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Evaluasi kinerja merupakan strategi dalam hal cara, hasil atau proses memusatkan kerja secara terperinci dan terarah. Evaluasi kinerja adalah proses bagaimana pembagian jabatan dan wewenang kepada setiap aparatur untuk dilaksanakan dalam menjalankan setiap kegiatan. Evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam mengefektifkan tentang pelayanan M-CAP adalah memposisikan aparatur sesuai

dengan kemampuan dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang handal, perbaikan infrastruktur, perawatan dan pemeliharaan sistem dengan kualitas yang baik serta biaya yang berkelanjutan.

Strategi evaluasi kinerja dalam pembinaan dan pengembangan kinerja aparatur ditujukan pada bagian yang berkaitan dengan pelayanan M-CAP, dalam hal ini yaitu bagi aparatur yang menjalankan unit M-CAP. Dengan demikian diharapkan kepada bagian tersebut di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dapat bekerjasama dengan bagian lain agar terciptanya kinerja aparatur yang berkualitas, sehingga aparatur mempunyai kemampuan di dalam menguasai M-CAP.

Ada beberapa strategi evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan M-CAP. Strategi pembinaan dan pengembangan kinerja aparatur, yaitu bagian aparatur yang mengelola unit M-CAP dengan menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya M-CAP, setelah ada pemahaman terhadap sistem informasi tersebut akan menjadikan kepedulian bahwa sistem informasi merupakan suatu tuntutan untuk dikuasai agar mempermudah pengaplikasian pelayanan M-CAP. Karena dengan adanya M-CAP yang ada di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Baratdapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui internet.

Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Baratuntuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang handal harus membuat suatu program peningkatan kualitas kinerja aparatur guna peningkatan mengenai sistem

informasi untuk pelayanan M-CAP, yaitu melalui pelatihan pengembangan aplikasi yang bertujuan bagi para pengelola aplikasi M-CAP agar setiap aplikasi yang mengalami perubahan dapat diikuti dan dilaksanakan oleh pengelola dengan baik. Selain itu aparatur Sub Bagian pelayanan M-CAP juga perlu *re-training* untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dibidang perangkat keras maupun perangkat lunak serta teknologi jaringan dan internet, maka secara bertahap program tersebut perlu direncanakan pelatihan/bimbingan khusus di bidang Teknologi Informasi dengan serius dan fokus.

Selain pelatihan, pembinaan dan *re-training* yang paling penting adalah membudayakan penggunaan komputer, sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan sehari-hari aparatur dalam mengerjakan urusan perkantoran yaitu dengan menggunakan komputer, namun membutuhkan waktu untuk mensosialisasikannya kepada aparatur. Oleh karena itu, setiap aparatur dalam penggunaan komputer harus dijadikan sebagai kesukaan agar pemahaman kepada alat tersebut sehingga dapat menjadi kemampuan yang dimiliki oleh semua aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Strategi evaluasi kinerja di bidang infrastruktur dilakukan melalui pendataan ulang dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki dimiliki oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara melakukan kerjasama antar kemitraan yang saling menguntungkan dengan *stakeholder*. Oleh karena itu pemeliharaan dan perawatan sistem pada unit mobile M-CAP harus terjaga dengan baik, maka dari itu semua pihak diharuskan mempunyai kepudulian untuk

memperhatikan kinerja aparatur, perangkat keras, perangkat lunak, data dan lain sebagainya, sebab strategi ini sangat penting guna menjamin kelancaran operasional yang optimal.

Faktor pembinaan dalam meningkatkan kemampuan kinerja aparatur merupakan prioritas utama agar aparatur dapat memiliki kemampuan pemahaman akan suatu sistem menjadi lebih tinggi, sehingga dalam waktu yang lama mampu melakukan pemeliharaan dan memperbaiki masalahyang terjadi pada perangkat keras, perangkat lunak dan data dengan cepat dan baik. Karena dengan kemampuan kinerja aparatur aparatur yang tinggi inilah nantinya akan menggunakan, mengoperasikan dan menerapkan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Strategi evaluasi kinerjayang terakhir dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam mengefektifkan M-CAP adalah memilik biaya yang berkelanjutan. Untuk dapat tercapainya sasaran yang diinginkan melalui pelaksanaan program yang disusun untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur guna peningkatan dalam pengelolaan keuangan maka perlu adanya dukungan ketersediaan biaya yang memadai.

Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dapat mengarahkan dan mengkoordinasikan kepada setiap bidang-bidang unit kerja serta perangkat kerja aparatur dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan program manajemen kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP. Dengan terjalinnya kerjasama antar bidang-bidang unit

kerja mampu mewujudkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien dalam pelayanan M-CAP.

> Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat telah mengevalusi semua kinerja aparaturnya pada bagian-bagian kerjanya, terutama pada bagian bidang telematika, pada bagian ini dinaskominfo telah melakukan dari hasil evaluasi kinerjanya yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, misalkan beliau di tempatkan di bagian bidang telematika dengan latarbelakang pendidikan yang ahli di bidangnya, agar hasil kerja yang dicapai bisa sesuai yang di inginkan. (Eko, 23/06/2012)

Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam hal ini pada Sub Bagian M-CAP sudah berjalan cukup baik, namun masih banyak permasalahan-permasalahan lain, seperti penempatan-penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan setiap aparatur sehingga menyulitkan pembinaan dan pengembangan kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP. Tidak terjalinya kerja sama yang sangat baik antar bagian-bagian unit kerja sehingga menyulitkan Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan dan pengembangan kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di semua bagian-bagian unit kerja yang ada di pembinaan dan pengembangan kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP.

4.3.1 Penyeleksian Informasi Manajemen Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Menyeleksi informasi kinerja aparatur dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan M-CAP yang berkualitas sebanyak mungkin, berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat sesuai dengan penempatan pegawai yang dibutuhkan. Menyeleksi informasi merupakan bagian dari manajemen kinerja aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, merupakan cara untuk mencari atau mendapatkan informasi-informasi tentang data-data pegawai, seperti perekrutan pegawai baru yang sesuai ahlinya serta mencari informasi mengenai pelayanan M-CAP masyarakat mana yang belum terjangkau layanan internet. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan calon pegawai atau pelamar yang memenuhi syarat-syarat menurut deskripsi pekerjan dan analisa kerja suatu instansi. Para calon pegawai tersebut nantinya akan dipilh yang terbaik dari sekian banyak calon pegawai.

Menyeleksi informasi adalah untuk mengisi formasi jabatan yang belum ditempati oleh pegawai. Lowongan formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, adanya pegawai yang keluar karena berhenti atau karena perluasan organisasi. *Kedua*, karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang belum ditempati, maka penerimaan pegawai harus berdasarkan kebutuhan. *Ketiga*, lowongan jabatan adalah semua lowongan yang ada pada unit-unit organisasi dilingkungan Dinas

komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. *Keempat*, untuk pengisian lowongan formasi dilakukan secara teliti, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperoleh pegawai yang penuh kesetiaan, bermental baik, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur utama Aparatur Negara.

Lowongan formasi merupakan sejumlah jabatan-jabatan yang belum terisi dan unit organisasi dalam lingkungan Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat yang melakukan formasi tersebut, untuk mengisi jabatan yang kosong beserta unit-unit operasionalnya. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan terhadap penggunaan formasi, maka proses merekrut calon pegawai baru dilakukan secara terpusat pada Pemerintah kabupaten bandung khususnya Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat yang bersangkutan.

Salah satu usaha untuk memperoleh tenaga yang cakap guna pengisian lowongan formasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi dilakukan untuk penerimaan pegawai baru yang memenuhi persyaratan, disamping dengan, sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, dimana penerimaan pegawai baru tersebut harus menjamin diperolehnya calon-calon pegawai yang cakap, terampil dan memenuhi persyaratan/ kebutuhan yang telah ditentukan.

Proses Menyeleksi informasi kinerja aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, melalui beberapa tahapan dalam penyeleksian informasi harus benar-benar berdasarkan formasi jabatan yang sesuai dengan penempatan pegawai yang diinginkan. Oleh karena itu, sebelum merekrut aparatur

perlu adanya persiapan perekrutan calon aparatur pegawai yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

Pertama, melakukan analisa pekerjaan terlebih dahulu. Analisa pekerjaan dilakukan untuk mengetahui jenis pekerjaan yang ditangani oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, yaitu menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Kedua, membuat deskripsi pekerjaan, yaitu pengidentifikasian berbagai macam kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi baik persyaratan tenaga yang dibutuhkan, ruang, dan peralatannya, juga karakteristik pekerjaan dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Pendeskripsian pekerjaan pada Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat terdiri dari analisa jabatan, peta jabatan dan formasi jabatan.

Ketiga, adalah melakukan analisa kebutuhan pegawai.Data yang dijadikan acuan dalam analisis kebutuhan berasal dari hasil pendeskripsian pekerjaan.Hasil dari analisa kebutuhan dijadikan dasar untuk membuat gambaran formasi yang memungkinkan untuk diisi dengan tenaga kerja yang sesuai dengan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Proses merekrut calon aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat ini terdiri dari tiga usaha, yaitu penarikan, seleksi, dan penempatan.Hal tersebut sesuai dengan proses Menyeleksi informasi yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, dimana akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Pertama, Penarikan calon aparatur kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, merupakan cara untuk mencari calon-calon pegawai yang melamar jabatan yang kosong atau belum terisi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin calon pegawai atau pelamar yang memenuhi syarat-syarat menurut deskripsi pekerjaandan analisa kerja suatu instansi. Para calon pegawai atau pelamar tersebut nantinya akan dipilih yang terbaik diantara mereka.

Kedua, Seleksi calon aparatur kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memutuskan pegawai yang tepat dari sekumpulan calon pegawai yang didapat dari proses penarikan. Berdasarkan hal tersebut, maka seleksi bertujuan untuk memilih pegawai yang baru untuk menjadi pegawai organisasi yang bersangkutan dan dapat juga untuk memilih pegawai untuk menduduki jabatan tertentu.Seleksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi umumnya terdiri dari beberapa tes, meliputi tes psikologis, tes pengetahuan, tes kecakapan kerja, tes kepribadian, tes kecerdasan, dan tes kesehatan.

Ketiga Penempatan calon aparatur kinerja aparatur dalam pelayanan M-CAP di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, dilakukan setelah calon-calon pegawai telah lulus dari proses seleksi. Selanjutnya bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian/ seleksi dicatat dalam daftar urutan, menurut jumlah hasil yang dicapai dan diajukan kepada bagian-bagian unit-unit organisasi yang memerlukan tenaga. Setelah dinyatakan lulus calon aparatur ditempatkan sesuai formasi yang diperuntukkan padanya dengan

memperhatikan pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian penempatan yang bersangkutan didasarkan kebutuhan organisasi dan didasarkan pada orang yang benar dan penempatan pegawai yang tepat.

Adapun prinsip pengisian lowongan jabatan adalah menempatkan pegawai yang tepat pada tempat yang tepat atau dengan perkataan lain pegawai yang ditunjuk untuk menduduki sesuatu lowongan jabatan haruslah mempunyai kecakapan dan kemampuan yang diperlukan untuk lowongan jabatan itu dengan memperhatikan faktor mental dan kejujurannya serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon pegawai.

Pelaksanaan penarikan pegawai di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan kebutuhan aparatur dalam menjalankan M-CAP. Hal ini dilakukan karena setiap calon pegawai yang direkrut harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan M-CAP.

Namun pada pelaksanaannya rekrut calon pegawai tidak didasarkan oleh kebutuhan, hal ini terlihat sekali banyak calon pegawai yang tidak memiliki pengetahuan dalam sistem informasi dapat bekerja di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

4.3.2 Pengkajian Informasi Manajemen Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan M-CAP Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Pengembangan dan pelatihan kinerja aparatur merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan, mengingat keadaan yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Pengembangan dan pelatihan manajemen kinerja aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu untuk mewujudkan profesional pegawai supaya kinerja para pegawai tersebut dapat meningkat.

Orientasi pengembangan manajemen sumber daya di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan profesional pegawai yang mengutamakan: *Pertama*, tenaga-tenaga yang mampu dalam melakukan analisa pekerjaan, artinya analisa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan akan kebutuhan aparatur, sehingga dinas komunikasi dan informatika dapat merencanakan kebutuhan aparatur berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggung jawab terhadap satuan unit kerja yang ada.

Kedua, tenaga-tenaga yang mampu melakukan analisa untuk kinerja aparatur yang akan dihubungkan dengan imbalan jasa atas pelaksanaan tugas yang dilakukan artinya, analisa terhadap kinerja aparatur tidak hanya dilakukan seorang pegawai (secara individual), tetapi juga kelompok, serta bagaimana cara melakukan penilaian pekerjaan tersebut.

Ketiga, tenaga-tenaga terampil yang mampu melakukan pengukuran baik terhadap analisa kebutuhan aparatur, analisa pekerjaan, uraian pekerjaan, analisa

jabatan, kinerja pegawai, imbalan jasa, yang disertai tolak ukurannya. Keempat, tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian ganda (*multi skilled*) artinya, aparatur yang berasal dari perguruan tinggi tidak hanya mempunyai satu keahlian saja.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan aparatur Negara yang diorientasikan kepada kemampuan, kesetian, pengabdian dan tanggung jawab pegawai negeri terhadap negara dan bangsa, merupakan salah satu usaha Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat untuk mengimbangi laju pembangunan dan menghadapi era globalisasi pasar bebas.

Berangkat dari hal tersebut maka Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat memerlukan adanya suatu pelatihan dan pengembangan bagi aparatur Negara sebagai investasi manusia yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi, tidak saja meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, juga dalam rangka mempercepat pemantapan perwujudan perilaku yang diinginkan.

Pembinaan aparatur oleh dinas komunikasi dan informatika dapat dilakukan dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang dapat mengembangkan kemampuan pegawai bukan saja untuk menangani pekerjaan mereka pada saat sekarang tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan mereka dimasa mendatang. Artinya pendidikan dan pelatihan merupakan investasi didalam diri setiap aparatur yang nantinya siap ditimba bila meningkatkan efektivitas operasional suatu organisasi.

Pengembangan dan pelatihan di dinas komunikasi dan informatika tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh keinginan dan kemauan dari masing-masing individu aparatur untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing aparatur. Hal ini yang harus diperhatikan oleh dinas

komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur dalam pengkajian informasi, yaitu:

> Pengembangan kerja pun bisa didapat melalui aparatur lain yang telah menangani atau melakukan pekerjaan yang sama, yakni dengan cara bertanya secara langsung atau mendengarkan cerita-cerita dari aparatur lainnya. Pengalaman kerja pun bisa mempengaruhi terhadap pengembangan kinerja aparatur. (Eko, 23/06/2012)

Berdasarkan hasil wawancara pengembangan aparatur perlu disadari oleh semua pihak bahwa masalah kepegawaian merupakan masalah yang sangat kompleks untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan harapan dan tujuan yang hendak dicapai. Melatih dan mengembangkan aparatur kiranya sangat perlu dilakukan oleh dinas komunikasi dan informatika guna meningkatkan kinerja.

Usaha untuk meningkatkan kinerja aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat bisa melalui juga melalui pelatihan dan pendidikan agar setiap aparatur mampu menggunakan keahliannya dan pengetahuannya secara efektif dan efisiensi. Pendidikan dan pelatihan pun bisa memperluas dan memperdalam pengetahuan aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat. Pendidikan dan pelatihan sangat penting dalam membentuk tenaga-tenaga yang langsung dapat dipergunakan dalam bidang-bidang yang ada di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Pelatihan dan pengembangan aparatur yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, diterapkanuntuk meningkatkan kinerja aparatur yang dapat dirasakan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, apa yang menjadi tujuan dan harapan dinas komunikasi dan informatika dapat tercapai dengan baik.

Mewujudkan hal tersebut Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat mengambil langkah dengan menjadikan pelatihan dan pengembangan masuk kedalam kegiatan fungsi manajemen yang diterpakan dan menjadi bagian dari program kerja di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, hal ini kinerja aparatur dapat senantiasa berjalan secara bertahap dan berkesinambungan.

Manajemen merupakan proses mengatur kinerja aparatur untuk meningkatkan kinerja aparatur, karena itu manajemen sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja aparatur Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Baratagar tercapainya tujuan bersama.

Pada pelayanannya pengembangan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat telah berjalan cukup baik, walaupun masih banyak aparatur-aparatur yang masih kurang sesuai harapah Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.Hal ini dilatar belakangi oleh belum adanya keinginan setiap aparatur dalam pengembangan dan pelatihan diri.

4.3.3 Penarikan Kesimpulan Manajemen Kinerja Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat Dalam Pelayanan M-CAP

Menrarik dari hasil kesimpulan kinerja aparatur yaitu guna untuk Membandingkan hasil yang akan di capai dengan mengumpulkan informasi sehingga di dapatnya menarik kesimpulan dan hasil evaluasi terhadap penggunaan

pelayanan M-CAP. Menarik kesimpulan merupakan strategi dalam hal cara, hasil atau proses kerja mengendalikan upaya atau perhatian terhadap sasaran yang sempit. Menarik kesimpulan adalah memfokuskan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang dipilih. Menarik kesimpulan yang telah dilakukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat dalam mengefektifkan M-CAP adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang handal, perbaikan infrastruktur, perawatan dan pemeliharaan sistem dengan kualitas yang baik serta biaya yang berkelanjutan.

Strategi Menarik kesimpulan pembinaan dan pengembangan kinerja aparatur ditujukan pada bagian yang berkaitan dengan M-CAP, dalam hal ini yaitu bagi aparatur bidang teknologi informasi khususnya pada bagian pelayanan M-CAP. Dengan demikian diharapkan kepada bagian tersebut di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Baratdapat terciptanya kinerja aparatur yang berkualitas, sehingga aparatur mempunyai kemampuan di dalam menguasai M-CAP untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Baratuntuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang handal harus membuat suatu kesimpulan peningkatan kualitas kinerja aparaturguna peningkatan mengenai M-CAP, yaitu melalui pelatihan pengembangan aplikasi yang bertujuan bagi para pengelola aplikasi M-CAP agar setiap aplikasi yang mengalami perubahan dapat diikuti dan dilaksanakan oleh pengelola dengan baik. Selain itu aparatur juga perlu *re-training* untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dibidang perangkat keras maupun perangkat lunak serta teknologi jaringan dan internet,

maka secara bertahap program tersebut perlu direncanakan pelatihan/bimbingan khusus di bidang Teknologi Informasi dengan serius dan fokus.

Selain daripada pelatihan, pembinaan dan *re-training* yang paling penting adalah membudayakan penggunaan komputer, sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan sehari-hari aparatur dalam mengerjakan urusan perkantoran yaitu dengan menggunakan komputer, namun membutuhkan waktu untuk mensosialisasikannya kepada aparatur. Oleh karena itu, setiap aparatur dalam penggunaan komputer harus dijadikan sebagai kesukaan agar pemahaman kepada alat tersebut sehingga dapat menjadi kemampuan yang dimiliki oleh semua aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Pemahaman akan komputer sebagai alat yang perlu untuk digunakan untuk semua orang sehingga dalam waktu yang tidak relatif lama budaya penggunaan komputer telah tersosialisasikan bagi seluruh aparatur yang ada. Dengan demikian pembudayaan komputer perlu adanya dorongan dan motivasi yang tinggi untuk selalu menggunakannya secara terus-menerus, disinilah peran seorang atasan atau pemimpin harus dapat memacu bawahannya agar penggunaan komputer menjadikan prioritas utama untuk dikuasai oleh aparatur, sehingga budaya penggunaan komputer sudah tidak asing lagi dan dapat diterima oleh semua aparatur yang ada di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Faktor pembinaan dalam meningkatkan kemampuan kinerja aparatur merupakan prioritas utama agar aparatur dapat memiliki kemampuan pemahaman akan suatu sistem menjadi lebih tinggi, sehingga dalam waktu yang lama mampu melakukan pemeliharaan dan memperbaiki masalah yang terjadi pada perangkat

keras, perangkat lunak dan data dengan cepat dan baik. Karena dengan kemampuan kinerja aparatur aparatur yang tinggi inilah nantinya akan menggunakan, mengoperasikan dan menerapkan sistem informasi penanaman modal di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, bahwa:

> Menarik kesimpulan yang ditetapkan dalam program kinerja aparatur kepada setiap perangkat kerja aparatur harus mempunyai kesimpulan, sehingga tidak timbul hal-hal yang dapat menghambat program kinerja aparatur. Ukuran yang telah ditentukan oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat, program yang dilaksanakan ditingkat bidang-bidang unit kerja yang ada dengan adanya sistm pelaporan kinerja kepada kepala dinas. (Eko, 23/06/2012)

Berdasarkan hasil penelitian diperlukannya peran utama dari pengendalian manajemen oleh kepala dinas untuk membantu pelaksanaan strategi. Strategi yang telah direncanakan merupakan faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari sebuah program kinerja aparatur. Dengan hasil akhir dari sebuah program yang berhasil serta berjalan sesuai rencana.

Lingkungan yang cepat berubah dan dinamis, seperti di dinas komunikasi dan informatika. Untuk menciptakan suatu suasana organisasi yang baik dalam peningkatan kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup sebuah organisasi.

Kondisi kurangnya partisipasi perangkat kerja aparatur dalam menjalankan suatu program kinerja aparatur bukanlah merupakan kendala paling utaman dalam menjalankan fungsi kinerja aparatur, namun hal lain yang lebih penting adalah kesadaran dan insiatif dari setiap perangkat kerja aparatur dalam peningkatan kinerja. Hal ini akan teratasi bila danya kesadaran dari setipa perangkat kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja.

Usaha untuk mewujudkan program kinerja aparatur memerlukan waktu atau proses yang bertahap, seiring dengan siapnya setiap aparatur dan makin tingginya kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program kinerja aparatur di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, program kinerja aparatur yang berada di Dinas komunikasi dan informatika pada setiap bidang-bidang unit kerja belum bisa menerapkan manajemen secara baik dan menyeluruh, sehingga hasil yang diharapkan belum mencapai hasil standar yang telah ditentukan oleh Dinas komunikasi dan informatika.